

## **BAB IV**

### **KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KOMUNITAS CINA DI YOGYAKARTA TAHUN 1946-1960**

#### **A. Hubungan Komunitas Cina dengan Pribumi di Yogyakarta**

Orang Cina sudah berinteraksi dengan masyarakat dan dikenal sebagai pedagang sejak awal kehadirannya di Yogyakarta. Orang Cina sudah turun menurun tinggal di Yogyakarta, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi. Bidang usaha yang mereka jalankan cukup beragam, seperti usaha rumah makan, hasil bumi, kelontong, dan lain-lain. Orang Cina di Yogyakarta memperdagangkan semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Toko-toko disepanjang jalan utama di Yogyakarta, sejak yang kecil maupun yang besar sebagian besar merupakan milik orang Cina. Toko-toko itu sebagian juga masih merupakan tempat tinggal mereka.<sup>1</sup>

Orang Cina yang tinggal di tepi jalan raya secara psikologis ada rasa keengganan untuk keluar rumah karena letak rumahnya tidak mengarah ke kampung, sehingga akan menyulitkan mereka untuk berbaur dengan penduduk kampung setempat. Mereka cenderung masih sulit untuk memahami dan menerima kebiasaan-kebiasaan penduduk setempat. Sebaliknya, bagi mereka yang tinggal di dalam kampung telah terbiasa berinteraksi dengan penduduk

---

<sup>1</sup> Golongan Tionghoa oleh pemerintah Kesultanan dan Kolonial Belanda hanya diperkenankan tinggal di Kranggan. Namun, karena jumlah mereka semakin besar, maka mereka diperbolehkan mendirikan tempat tinggal di sebelah selatan rel kereta api. Akibatnya, hal tersebut menambah ramainya jalan raya antara tugu sampai batas Pasar Bringharjo yang sekarang terkenal dengan nama Malioboro. Legowo, M., “pandangan masyarakat Jawa terhadap Muslim Cina di kotamadya Yogyakarta: suatu penelitian awal tentang masalah pembauran”, *Skripsi*, Yogyakarta: FIB UGM, 1986.

setempat yang berbeda etnis. Hal ini akan memudahkan mereka untuk berbaur dengan masyarakat pribumi.<sup>2</sup> Orang Cina banyak berhubungan dengan pribumi atau masyarakat luas karena menjual barang kebutuhan sehari-hari, sementara pribumi lebih banyak berhubungan dengan para pendatang atau wisatawan yang membeli barang-barang seni mereka. Oleh karena itu, di mata masyarakat, orang Cina tampak lebih menonjol sebagai pedagang dibanding pribumi.

Komunitas Cina yang tinggal di Yogyakarta dalam kehidupan sehari-sehari sering diterima sekaligus ditolak oleh masyarakat pribumi. Penolakan yang dialami dapat datang dengan aneka alasan, misalnya kecemburuan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Orang Cina kurang bergaul dengan alasan kesibukan pekerjaan. Salah satu sifat positif orang Cina adalah pekerja keras, sehingga jika mereka bekerja sering kurang melihat waktu dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya sosial.

Oleh karena itu, mereka sering dilihat sebagai kelompok yang tidak mau bergaul. Adapun ukuran yang dipakai jika seseorang dikatakan mau bergaul adalah menghadiri pertemua-pertemuan kampung, seperti arisan, ronda, pengajian, atau rapat-rapat kampung. Orang Cina di Yogyakarta mempunyai kemahiran istimewa untuk hidup dalam ketegangan antara penerimaan dan penolakan. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak melukai hati penduduk

---

<sup>2</sup> P. Hariono, *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, hlm. 176.

lokal. Karenanya mereka mempelajari bahasa Jawa, ikut aktif dalam kegiatan lokal, tidak memamerkan kekayaan, hidup secara sederhana.<sup>3</sup>

## **B. Faktor keberhasilan perdagangan komunitas Cina**

### **1. Sifat orang Cina**

Keberhasilan orang Cina dalam bidang perdagangan sering kali menimbulkan pertanyaan banyak, bagaimana orang Cina begitu sukses dalam perdagangan dan ekonomi padahal banyak di kalangan *tauke*, *taiko*, dan *taikun*<sup>4</sup> Cina berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kebanyakan dari mereka hijrah dari negara Cina hanya membawa baju yang melekat di badan dan tidak mempunyai apa-apa termasuk harta benda serta pendidikan.

Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengecap pendidikan secara formal dan bahkan buta huruf.<sup>5</sup> Namun mereka berhasil muncul sebagai pedagang yang sukses dan kaya raya. Banyak orang Cina menjadi kaya diluar negeri dan bukan di negara asal mereka. Ekonomi Asia Tenggara rata-rata dikuasai dan didominasi oleh orang Cina. Kedatangan mereka pada awalnya bertujuan mencari kesejahteraan hidup yang lebih baik.

---

<sup>3</sup> Faruk, *Pengalaman, Kesaksian, dan Refleksi Kehidupan Mahasiswa di Yogyakarta*, Yogyakarta: Interfidei, 1999, hlm. 56.

<sup>4</sup> Tauke, taiko, dan taikun adalah termilogi yang berarti “juragan”. Lihat, Twang Peck Yang, *Elite bisnis Cina di Indonesia dan masa transisi kemerdekaan 1940-1950*, Yogyakarta: Niagara, 2004, hlm. 216.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Drs. Ma'ruf Siregar. Pada tanggal 17 September 2011, pukul 18.22. di rumah pak Ma'ruf (Cokrookusuman Baru, Jetis 2/980, Yogyakarta).

Namun pada akhirnya, mereka yang memberi makan dan membuka kesempatan kepada penduduk setempat.<sup>6</sup>

Kehadiran orang Cina membuat iri hati dan dicurigai. Dalam kebanyakan kasus, orang Cina sering kali di salahkan sebagai penyebab kemiskinan, kemunduran dan kemelaratan bangsa-bangsa lain. Hal ini tidak seharusnya terjadi karena hal ini tidak memberikan gambaran yang benar tentang orang Cina. Baik disadari ataupun tidak, orang Cina tidak menjadi kaya dan menguasai ekonomi dalam sekejap mata. Proses ini memakan waktu panjang dan terjadi secara evolusi selama bertahun-tahun.

Orang Cina berdagang mulai dari bawah. Dari yang tidak punya apa-apa hingga akhirnya menjadi orang terkaya dan berhasil. Semuanya itu tidak diperoleh secara *magic*. Tidak ada *magic* dalam keberhasilan orang Cina. Mereka seperti bangsa-bangsa lain juga, mau tidak mau ikut berusaha dan bersaing. Mereka menahan diri untuk tidak tidur dan berhemat. Mereka selalu bangun pagi-pagi untuk bekerja karena mereka yakin bahwa bangun pagi akan mendapatkan banyak rejeki. Mereka mengorbankan waktu luang dan mengambil resiko untuk dapat memajukan perdagangannya.<sup>7</sup> Perdagangan Cina juga mengalami jatuh bangun, kadangkala, mereka rugi dan di lain waktu untung. Banyak yang sudah berhasil dan tidak sedikit juga yang mundur ditengah jalan. Apa yang dialami oleh pedagang lain

---

<sup>6</sup> Yudi Prasetyo, Ekonomi Perdagangan Orang Cina di Kota Yogyakarta 1907-1954, *Skripsi*, Yogyakarta: FIB UGM, hlm. 45.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Heni (Sya Wi Yah), pada tanggal 4 oktober 2011, pukul 17. 06. Pada waktu perjalanan pengajian ke Godean.

juga dialami oleh orang Cina. Maka sebenarnya, tidak benar jika mengatakan bahwa keberhasilan ekonomi perdagangan orang Cina disebabkan oleh tipu daya dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain.<sup>8</sup>

Orang Cina berhasil bukan karena faktor keturunan. Jika dikatakan pandai, bangsa lain juga pandai dalam beberapa hal, penduduk asal dan penduduk sekitar sebenarnya mempunyai lebih banyak kelebihan dari pada orang lain. Faktor yang mendorong keberhasilan orang Cina, diantaranya adalah: kemiskinan, perasaan kurang aman, ajaran falsafah hidup yang mereka anut sejak kecil. Kekuatan yang memotivasi dan mendorong orang Cina untuk berkecimpung dalam kegiatan perdagangan adalah ajaran konfusianisme.<sup>9</sup> Konfusianisme Mengutamakan ketaatan pada ibu bapak dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Konfusianisme juga menekankan pentingnya menjadi keturunan untuk mempertahankan keturunan, orang Cina disarankan memiliki anak laki-laki.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yudi Prasetyo *op.cit.*, hlm. 46-47.

<sup>9</sup> Pada dasarnya, Konfusianisme menekankan pada moralitas yang harus dimiliki setiap manusia. Masalah moral ini berpusat dalam keluarga dan akan menjadi nyata manakala diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mendukung kesejahteraannya. Moralitas dalam keluarga sebagai tekanan dalam ajaran Konfusianisme menyebutkan bahwa seorang anak harus patuh dan taat serta hormat kepada kedua orang tua mereka. Sikap yang demikian dinyatakan dengan menanggung hidup mereka di masa tua tetapi juga menjaga nama baik dan status sosial bagi kedua orang tua mereka di mata masyarakat. Fung Yu Lan, *Sejarah Filsafat Cina*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 58-61.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Drs Arif Budiwijaya, B.Sc. pada tanggal 4 November 2011. Pukul 10.15. di Paguyuban Bhakti Putera Yogayakarta (jln. Gandekan Lor No. 25.)

Pada sistem sosial orang Cina, anak laki-laki adalah ahli waris keturunan. Mereka juga akan mewarisi harta dan kekayaan keluarga. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga. Mereka harus berusaha mengharumkan nama keluarga dan memuliakan keturunannya. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya dan mengangkat martabat keluarga adalah dengan menjadi kaya. Kekayaan dapat membeli kemewahan dan menjadikan semua orang dihormati dan dipandang mulia. Satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan menduduki jabatan tinggi dalam kerajaan namun, sejak runtuhan dinasti cina kuno, kesempatan menjadi kaya melalui cara ini dapat dikatakan hampir tertutup.<sup>11</sup>

Justru, satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan cara berdagang. Dengan kekayaan, keluarga akan hidup senang dan inilah salah satu cara orang Cina membala jasa ibu dan bapak mereka. Meskipun kasih sayang dan kepatuhan tidak dapat dinilai dengan uang, namun kekayaan akan dapat memberikan kebahagiaan dan meningkatkan status sosial keluarga dalam masyarakat. Menjadi kaya dan sukses dalam perdagangan atau pendidikan, menjadi jalan bagi orang Cina untuk membala segala pengorbanan serta jasa ibu bapaknya. Sejak kecil, orang tua orang Cina memberikan anjuran kepada anak-anak mereka agar berhasil dan menjadi

---

<sup>11</sup> Yudi Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 48.

kaya. Mereka menanamkan minat berdagang dengan harapan anak-anak mereka dapat hidup mandiri.<sup>12</sup>

Orang Cina tidak suka mendapat gaji. Golongan yang mendapat gaji tidak memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dalam perdagangan masyarakat Cina pada umumnya. Meskipun mungkin pendapatannya lebih kecil dari orang yang mendapat gaji, tetapi dianggap lebih baik dibanding bekerja pada orang lain. Berdagang sendiri berarti seorang dapat menjadi bos atau tuan. Bekerja dengan orang lain, sampai kapan pun akan dianggap sebagai kuli. Orang yang berdagang dikatakan berani dan hanya orang beranilah yang memiliki kesempatan menjadi kaya dan sukses menurut pandangan orang Cina.

Orang Cina pandai berpolitik. Politik dagang orang Cina adalah taktik untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Pelanggan harus dijaga perasaannya, dihargai, dijunjung tinggi-tinggi jangan sampai kecewa. Pelanggan adalah raja. Keuntungan berdagang hanya bisa didapatkan dari pelanggan.<sup>13</sup> Orang Cina lebih mengutamakan keuntungan jangka panjang dalam berdagang, dari pada keuntungan sesaat. Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, orang Cina berani merugi terlebih dahulu.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Tan Sae Kang. Pada tanggal 28 Oktober 2011, pukul 10.31. di warung makan (jln. Gandekan Lor No. 32.)

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs. Ma'ruf Siregar. Pada tanggal 6 Oktober 2011, pukul 18.35. Di warung kelontong (Cokrookusuman Baru, Jetis 2/999, Yogyakarta).

Keuntungan kecil tapi berkelanjutan lebih baik dari pada untung besar lalu mati.<sup>14</sup>

Bidang perdagangan bukanlah bidang yang mudah dan menuntut seseorang bekerja lebih keras dan lama dibandingkan mereka yang mendapat gaji. Mereka berusaha memajukan perdagangan, karena lebih keras mereka bekerja maka lebih besar keuntungan yang akan mereka peroleh. Sebagai *tauke* mereka memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan dan menentukan arah perdagangan. Jika rugi mereka akan menanggung segala akibatnya dan menganggap kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda serta bukan merupakan akhir dari segalanya.

Perdagangan bagi orang Cina menjanjikan keuntungan yang menarik dan kesempatan untuk dapat keluar dari kepompong kemiskinan serta belenggu kesusahan. Tidak ada rahasia dalam perdagangan orang Cina selain berani mencoba, berbuat, dan bekerja keras.<sup>15</sup> Apabila berbuat, hendaknya hingga berhasil dengan semangat totalitas dan tidak setengah-tengah dalam mengerjakan sesuatu. Acuh tak acuh tidak ada dalam kamus dagang orang Cina. Yang ada hanyalah berbuat benar dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sulistiowati (Wie Khio Hua), pada tanggal 28 Oktober 2011, pukul 10. 16. Di warung makan ( jln Gandekan Lor No. 31).

<sup>15</sup> Paling tidak ada tiga nilai yang sering disebut sebagai penentu perilaku bisnis golongan Tionghoa: yaitu *Hopeng, Hong Sui, dan Hoki*. Ketiganya merupakan nilai kepercayaan, dan (mungkin) juga mitos yang dipakai untuk menjalankan bisnis, sekaligus yang mewarnai keberanian dalam berspekulasi dalam menjalankan bisnis. T. Hani Handoko, *Tradisi(manajemen) Dagang ala Tionghoa*, Jakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, hlm. 53.

## 2. Etos Kerja

Secara luas di akui bahwa budaya Cina mempunyai suatu etos kerja yang menekankan pada keuletan dan kerajinan. Ada tiga penjelasan yang saling berhubungan tentang etos kerja orang Cina. Pertama, orang Cina di besarkan dengan nilai-nilai yang berbeda. Nilai positif tentang kerja keras secara kuat ditanamkan ke dalam diri anak-anak Cina pada usia dini. Bagi komunitas Cina, kerja di hubungkan dengan kumpulan nilai yang kompleks yang mencangkup pengorbanan diri, saling ketergantungan, rasa percaya, dan hemat, yang dipandang sebagai dasar bagi terkumpulnya kekayaan.

Kedua, orang Cina bekerja keras untuk mendapatkan ganjaran materi. Dalam komunitas Cina, kemakmuran, perasaan nyaman dan aman dalam usia lanjut menduduki posisi sentral dalam persepsi bersama tentang kehidupan yang baik. Dengan kata lain, insentif untuk bekerja keras secara langsung berhubungan dengan martabat sosial dan jaminan masa depan.<sup>16</sup>

Ketiga, etos kerja orang Cina mempunyai orientasi kelompok. Orang Cina tidak bekerja semata-mata untuk keuntungan pribadi, melainkan pertama-tama untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan kemudian untuk kebaikan bersama masyarakat. Orang Cina bekerja keras bila mereka melihat kemungkinan manfaat jangka panjang untuk unit-unit ekonomi dasar mereka, yang dimulai dengan keluarga dekat mereka, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keturunan mereka. Orientasi keluarga

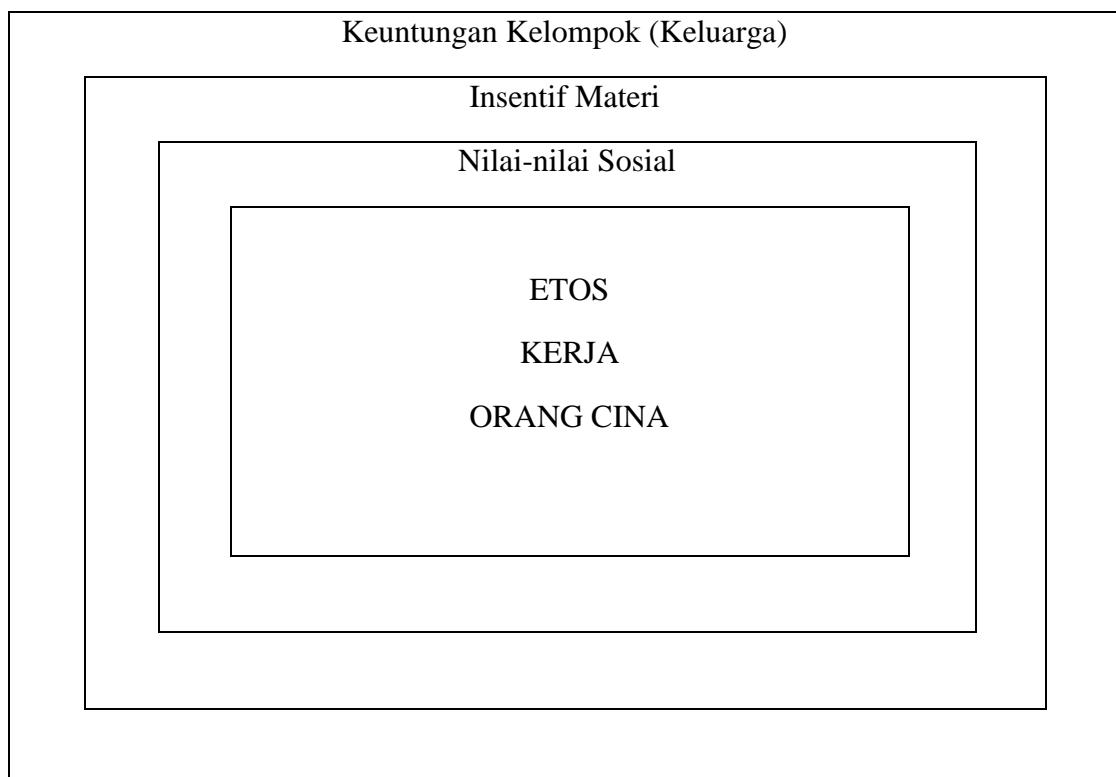
---

<sup>16</sup> Stephen Suleeman, *Sukses bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis, dan Jaringan International*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995. hlm 52.

dan keinginan untuk memperhatikan keturunan terkandung dalam ketaatan keluarga terhadap ajaran Konfusian.<sup>17</sup> Gambar 1 melukiskan dasar etos kerja Cina.

Orang Cina bekerja keras, bukan hanya karena mereka telah dididik untuk menghargai kerja keras dan untuk imbalan materi serta kehormatan sosial, tetapi juga karena keberhasilan finansial memberikan kehormatan bagi leluhur mereka.<sup>18</sup>

*Gambar 1: Etos Kerja Orang Cina*



<sup>17</sup> Drs Arif Budiwijaya, B.Sc. *loc.cit.*

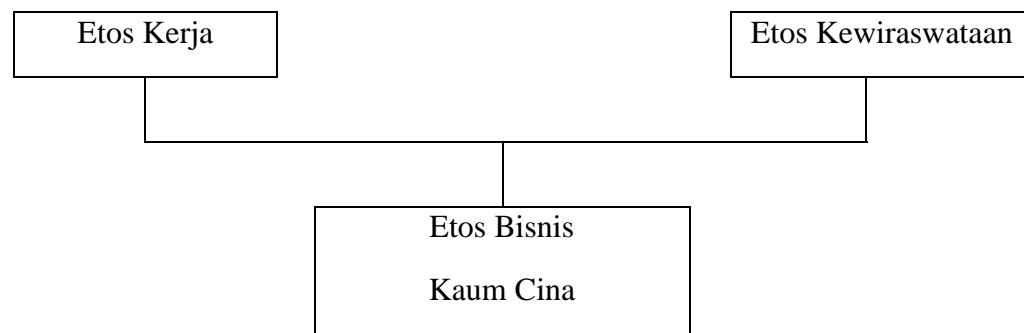
<sup>18</sup> Stephen Suleeman, *op.cit.*, hlm 55.

### 3. Etos kewiraswastaan

Kewiraswastaan orang Cina adalah bagian yang penting bagi etos kerja orang Cina dan didesifiniskan sebagai suatu nilai budaya yang menuntut seseorang menginvestasikan sumber-sumber dayanya dalam usaha jangka panjang guna meningkatkan kesejahteraan materi dan jaminan bagi keluarga dekatnya serta untuk meningkatkan martabat sosial dalam garis keturunannya. Ajaran-ajaran utama dari Etos kewiraswataan orang Cina adalah keterpusatan pada keluarga dan orientasi terhadap masa depan.<sup>19</sup>

Gambar 2 memperlihatkan bagaimana etos kerja Cina dan semangat kewiraswataan bergabung untuk membentuk etos bisnis kaum Cina.

*Gambar 2: Etos Bisnis Kaum Cina*



Sejumlah atribut yang sangat dijunjung tinggi telah menyumbang bagi keberhasilan etos kewiraswataan orang Cina. Atribut-atribut tersebut adalah kehandalan dan dapat di percaya, membangun hubungan dan jaringan, akan di uraikan dibawah ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 86.

**a) Kehandalan dan dapat dipercaya**

Kedua hal ini adalah kualitas yang dipandang bagian integral dari keberhasilan bisnis. Bila seorang Cina gagal membuktikan bahwa ia layak dipercaya oleh anggota-anggota masyarakat bisnis, kecil kemungkinannya ia akan mendapatkan kredit dan bantuan keuangan. Transaksi-transaksi bisnis Cina yang bernilai jutaan dollar disahkan hanya dengan jabat tangan. Kehormatan seseorang dalam komunitas bisnis Cina tidak boleh dianggap remeh.

Kepercayaan dan kehandalan diantara Cina diperoleh dari kewajiban-kewajiban sosial dan bukan dari hubungan-hubungan kontraktual. Tingkat kepercayaan seperti itu hanya dapat dipupuk dengan membangun hubungan yang kuat antara kedua pihak yang berkepentingan.<sup>21</sup>

Faktor penting lainnya dalam menghormati kewajiban-kewajiban bersama berakar dari etika Konfusian. Keluarga bisnis Cina pada umumnya menjaga nama keluarga dengan baik. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut berarti melanggar atas bakti pada keluarga karena usaha penanganan bisnis secara tidak langsung akan membawa malu dan aib bagi leluhur seseorang, yang biasanya diungkapkan dalam marga seseorang.

---

<sup>21</sup> Heni (Sya Wi Yah), *loc.cit.*

**b) Membangun hubungan dan jaringan**

Hampir semua transaksi bisnis wiraswastawan Cina dilakukan berdasarkan hubungan pribadi. Membangun hubungan dan kepercayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kredibilitas dan posisi seseorang di kalangan komunitas bisnis Cina biasanya merupakan hasil dari kepercayaan yang telah dibina seseorang selama bertahun-tahun menjalin hubungan.<sup>22</sup>

Untuk memulai sebuah hubungan bisnis, para wiraswatawan Cina tidak pernah secara langsung saling mengadakan pendekatan. Sebaliknya, hal itu diatur melalui orang ketiga, yang biasanya dikenal oleh kedua belah pihak, yang bertindak sebagai “comblang” untuk perkenalan pertama. Pertemuan ini biasanya diadakan di sebuah restoran atau secara lebih santai disebuah klab malam. Pertemuan ini tidak pernah diadakan di rumah salah satu pihak. Begitu hal ini dilakukan, hubungan pribadi pun terbentuk dan awal sebuah rasa saling percaya yang tidak resmi dimulai.<sup>23</sup>

Hubungan mungkin dimulai dengan transaksi-transaksi kecil yang kecil pula resikonya dan karena itu tidak banyak membutuhkan kepercayaan. Perlahan-lahan transaksi yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar dan saling percaya yang lebih besar pun terselenggara. Bila kedua belah pihak terus melunasi utang dan kewajiban mereka

<sup>22</sup> Stephen Suleeman, *op.cit.*, hlm 56-57.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 60.

secara adil dan jujur, rasa saling percaya di antara mereka akan terus tumbuh dan berkembang.

Seiring dengan makin mendalamnya hubungan, para usahawan tergerak untuk saling berbagi kesempatan-kesempatan bisnis yang baru, bekerja sama dalam usaha-usaha yang baru, dan biasanya saling memberikan dukungan sosial, saling menolong dan membantu. Hubungan-hubungan komersial ini hanya dapat dibentuk dalam jangka waktu yang cukup panjang dan mewakili suatu investasi yang substansial dalam bentuk waktu dan uang. Begitu dasar hubungan yang telah dibangun, sangat kecil kemungkinan para pedagang Cina akan menghancurkan dengan melanggar perjanjian. Tidak jarang kita menemukan hubungan bisnis di dalam jaringan Cina yang telah terjalin selama lebih dari satu generasi.<sup>24</sup>

Membangun kepercayaan dan kewajiban sosial, seorang wiraswastawan Cina perlahan-lahan membangun sebuah jaringan kontak yang dapat diandalkan. Jaringan-cenderung mengambil pola serupa dengan jaringan sosialnya. Pada soal kepercayaan, seorang Cina cenderung mempercayai keluarganya secara mutlak, tetapi diantara teman dan kenalan kepercayaan itu hanya dilaksanakan sejauh rasa saling ketergantungan itu telah tercipta dan telah dipertaruhkan di dalam hubungan tersebut. Penghargaan tinggi yang diberikan kepada hubungan keluarga ini mendorong keluarga-keluarga bisnis Cina untuk

---

<sup>24</sup> Heni (Sya Wi Yah), *loc.cit.*

mengadakan hubungan antar perkawinan, dengan demikian mengukuhkan ikatan darah dan ikatan yang tidak dapat diputuskan.<sup>25</sup>

### C. Kehidupan Sosial Ekonomi Cina di Yogyakarta

Hanya sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945 proklamasi telah diumumkan di Yogyakarta lewat harian “*Sinar Matahari*”. Kenyataannya Jepang masih tetap berkuasa dengan segala kelengkapan senjatanya. Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VII mengirimkan ucapan selamat lewat surat kawat kepada Presiden atas berdirinya Republik Indonesia. Dalam harian *Sinar Matahari*, Sultan HB IX menyatakan bahwa sekarang kemerdekaan telah berada di tangan Bangsa Indonesia. Nasib nusa dan bangsa adalah di tangan Bangsa Indonesia sendiri, dan tergantung kepada Bangsa Indonesia sendiri, Bangsa Indonesia harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama, yaitu memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.

Proklamasi kemerdekaan tidak diikuti dengan huru-hura rasial di Yogyakarta. Hal ini disebabkan dari sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mampu memegang kendali atas kemenangan dan ketertiban di daerah Yogyakarta setelah kekalahan Jepang. Itu juga tidak lepas dari kebijakan Sultan yang selalu melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat

---

<sup>25</sup> Stephen Suleeman, *loc.cit.*

termasuk juga golongan Cina dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Yogyakarta.<sup>26</sup>

Pada tanggal 4 Januari 1946 Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta yang kemudian menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Pemerintah Republik menerima undangan Sri Sultan untuk pindah ke Yogyakarta karena stabilitas sosial dan letaknya di tengah-tengah pulau Jawa. Masuknya sekitar 50.000 orang tokoh-tokoh politik, personil militer, dan pegawai pemerintah dari Jakarta, bersama tiga belas kementerian, mengharuskan dibentuknya pemerintahan khusus, yang terpisah dari pedesaan.<sup>27</sup>

Kota Yogyakarta harus menerima Konsekuensi sosial ekonomi yang berat karena kedudukannya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dan harus menerima tindakan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda berusaha menutup jalur-jalur ekonomi DIY yang selama ini menghidupinya. Jumlah penduduk Yogyakarta setiap hari bertambah akibat kedatangan pengungsi-pengungsi yang berasal dari lain daerah.

Masalah terbesar yang dihadapi Pemerintah di Yogyakarta adalah mengambil alih kekuasaan dari Tentara Pendudukan Jepang dengan merebut senjata dari pihak Jepang. Aksi serentak pengambilalihan kekuasaan pimpinan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan dimulai 26 September 1946 di

<sup>26</sup> Didi Kwartanda, “ Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945”, *Skripsi*, Yogyakarta: FIB UGM, hlm. 229.

<sup>27</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 71.

bawah pimpinan Komite Nasional Indonesia (KNI).<sup>28</sup> Aksi mogok dari buruh mendapat dukungan dari rakyat Yogyakarta yang bersama BKR mengepung kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai Jepang.

Rakyat yang mendendam karena segala kebijakan Jepang yang membuat masyarakat menjadi miskin, memuntahkan segala amarahnya yang diwujudkan dalam tindakan melucuti serdadu tentara Jepang di berbagai tempat, senjata bambu runcing yang pada mulanya diperkenalkan sendiri oleh Jepang, pada akhirnya menjadi bumerang yang dipakai untuk melawan Jepang.<sup>29</sup> Dengan berhasilnya merampas senjata-senjata dari Jepang itu maka kekuatan militer Jepang berhasil ditumbangkan.

Pemerintah mengeluarkan alat pembayaran resmi yang berlaku di dalam negara, yaitu uang Republik Indonesia (ORI). ORI tidak hanya bermakna politis tetapi juga dimaksudkan untuk menyehatkan jalannya perekonomian, karena uang Jepang ketika itu telah mengalami inflansi yang sangat parah. Tindakan lain yang menyangkut perbaikan ekonomi ialah didirikannya Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1946. Salah satu tugas utama dari

<sup>28</sup> KNI merupakan salah satu amanat dari Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 23 Agustus 1945. Para pangreh praja, alim ulama, kaum pergerakan, pemuda, kaum dagang dan perniagaan, termasuk di dalamnya kaum Tionghoa, harus bekerja sama dengan KNI. KNI pusat dan daerah harus meliputi semua aliran masyarakat. KNI Yogyakarta dibentuk oleh Sultan HB IX dengan anggota-anggota bekas Hookookai dan angkatan-angkatan muda.

<sup>29</sup> Ki Nayono, *Keadaan Sosial Masyarakat Yogyakarta dan Daerah-daerah Lainnya pada Masa Pendudukan Bala Tentara Dai Nippon (Jepang) tahun 2602-2605 J/1942-1945*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Ilmu Tradisional, Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Derah Propinsi DIY, 2003, hlm.109-113.

Bank Negara Indonesia ialah untuk mengatur nilai tukar antara ORI dengan nilai valuta asing yang beredar di Indonesia.<sup>30</sup>

Pada masa perang kemerdekaan dengan ekonomi darurat, kehidupan ekonomi dalam semua sektor berada di dalam pengendalian pemerintah. Peranan golongan swasta terdesak, namun demikian golongan ini tetap berusaha untuk memainkan peranannya di dalam usaha perekonomian negara. Barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya setiap hari bertambah mahal. Di kota sering terjadi kelaparan. Untuk mengatasi kelaparan itu penduduk terpaksa makan daun-daunan dan buah-buahan mentah sekedar untuk mengganjal perut.<sup>31</sup>

Kekurangan makan dan kebutuhan pokok sehari-hari, menimbulkan suasana yang tidak tenram. Suasana makin diperberat adanya tindakan-tindakan yang tidak bertangung jawab dari sekelompok orang yang melakukan perampukan-perampukan. Mereka melakukan penggarongan-penggarongan terhadap rumah-rumah penduduk yang kosong karena pemiliknya mengungsi dan juga rumah-rumah penduduk yang masih berpenghuni. Mereka melakukan perampukan dengan berbagai motif. Ada yang melakukannya karena desakan ekonomi, ada juga yang memang pekerjaannya perampok.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (jilid VI), Jakarta: Depdikbud, 1975, hlm. 218.

<sup>31</sup> 90 Pct Perusahaan di Kuasai Pemerintah, *Kedaulatan Rakyat*, 10 September 1959, hlm. 2, kolom 2.

<sup>32</sup> Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta, Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 415.

Komunitas Cina sangat berperan dalam Perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain dalam membantu suplai bahan-bahan makanan dan menyelundupkan senjata dari Singapura untuk keperluan para gerilyawan. CHTH Yogyakarta telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan uang sejumlah *f* 50.000 kepada K.R.T Kertanegara untuk *fonds* kemerdekaan. Tindakan CHTH Yogyakarta ini merupakan salah satu bentuk hubungan timbal balik dari warga Cina Yogyakarta terhadap kraton Kasultanan Yogyakarta yang diwakili oleh K.R.T Kertanegara.

Selain itu di Yogyakarta sendiri bantuan bagi para pejuang Indonesia juga datang dari seorang pengacara, Ko Siok Hie, yaitu dengan memberikan makanan yang tahan lama berupa kue keranjang yang disimpan di Gandekan dan didistribusikan dari rumah milik Oei Tik Giauw. Pertama-tama jumlahnya sebesar 10 kwintal, dan dibagikan kepada anak-anak kecil supaya disebarluaskan pada masyarakat. Komunitas Cina secara umum ikut dalam usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan, tetapi karena mereka tidak membuat pasukan khusus Cina melainkan hanya bergabung dengan pasukan yang sudah ada, maka keterlibatan masyarakat Cina sering kali dianggap tidak ada.

Pada pertengahan 1946 pihak penguasa Belanda mengambil langkah besar dalam bernegosiasi dengan pemerintah Republik. Komisi Jenderal dikirim ke Yogyakarta untuk berunding dengan pemerintah Indonesia, perundingan ini menghasilkan penandatanganan kesepakatan genjatan senjata 14 Oktober 1946, disusul dengan disepakatinya Perjanjian Linggarjati tanggal 15 November

1946. Perjanjian ini membuka jalan kerja sama antara pemerintah Republik Belanda dengan Belanda, termasuk di bidang Ekonomi.

Konferensi masyarakat Cina juga diselenggarakan di Yogyakarta antara 17-19 September 1946. Wakil Presiden Republik Indonesia, Hatta dalam konferensi ini mengeluarkan pernyataan tegas mengenai permodalan Cina dan posisi ekonomi masa mendatang mereka di Indonesia. Dikwatirkan ketika kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan Belanda tampak menjanjikan, modal Cina menjadi tidak begitu penting dalam kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia.<sup>33</sup>

Menurut Hatta, posisi ekonomi masyarakat Cina setelah berakhirnya masa penjajahan Jepang, tetap lebih tinggi dibandingkan posisi masyarakat Cina pada umumnya. Hatta menegaskan bahwa pasal 33, yang menekankan bentuk koperasi dan kolektivisme, menentang individualisme dan kapitalisme. Katanya:

Masyarakat Cina di negara ini pada umumnya tergolong ke dalam kelas pengusaha, sebagian besar dari mereka adalah pedagang. Dalam struktur kapitalis, tujuan para pedagang adalah memperoleh untung sebesar-besarnya untuk diri mereka sendiri. Dan mengingat kenyataan bahwa kelompok pengusaha Cina telah dianggap sebagai kelanjutan dari kapitalisme barat di tengah masyarakat Indonesia, maka hal ini menciptakan suatu sikap tidak suka terhadap masyarakat Cina.<sup>34</sup>

Masyarakat Cina harus menyesuaikan diri dengan semangat perekonomian yang baru, dimana perekonomian bangsa tidak lagi dikendalikan oleh tangan-tangan swasta, namun harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Pemerintah

---

<sup>33</sup> Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm. 166.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 167.

berkuasa penuh atas koordinasi kegiatan produksi dan distribusi barang yang diproduksi. Posisi ekonomi kelas pengusaha Cina (kelas pedagang) akan diubah, alasannya adalah mereka dianggap sebagai kelanjutan kapitalisme asing. Seorang anggota delegasi Cina memohon kepada Hatta agar kalangan Cina diperbolehkan andil dalam produksi dan distribusi domestik. Delegasi Yogyakarta mengungkapkan banyaknya pedagang yang berpengalaman yang tidak lagi memiliki pekerjaan.<sup>35</sup>

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an melakukan pemberantasan dan melancarkan upaya untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.<sup>36</sup> Negara yang baru lepas dari kekuasaan kolonial umumnya mempunyai dorongan yang kuat untuk memperbesar peranan ekonomi warganegaranya, yaitu penduduk pribumi, dalam pemilikan dan penguasaan aset produktif. Orang-orang Indonesia dalam melaksanakan konsep nasionalis ini dihadapkan pada dua masalah, terutama dalam fase awal kemerdekaan.

*Pertama*, jumlah orang Indonesia yang sudah terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit untuk dapat melakukan tugas merencanakan dan melaksanakan kebijaksanaan guna mendorong perkembangan suatu kelas pengusaha dan untuk mempercepat perbaikan ekonomi golongan pribumi. *Kedua*, perusahaan-perusahaan milik asing dan orang Cina mendominasi sektor-sektor ekonomi modern, sedangkan orang Indonesia tidak memiliki modal dan kurang memiliki

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 167-168.

<sup>36</sup> Habisi Sama Sekali Kekuasaan Ekonomi Belanda di Sini, *Kedaulatan Rakyat*, 18 September 1959, hlm. 2, kolom 4.

ketrampilan berwiraswasta untuk bersaing dengan dengan orang Cina. Hanya sedikit kebijaksanaan yang berhasil menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam struktur perekonomian, sementara tidak ada pelaksanaan yang tegas dan konsisten untuk mendorong tumbuhnya suatu kelas pengusaha yang kuat dan efektif guna menggantikan pengusaha-pengusaha asing dan pedagang Cina.<sup>37</sup>

Kurang dari setahun setelah Belanda dengan resmi mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, pemerintah Indonesia memberlakukan satu Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sangat nasionalistik, sebagai upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial. Pemerintah dalam rencana itu akan menempuh kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Program Benteng, program ini berusaha melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi serta menekan persaingan asing, selanjutnya untuk memperkecil ketergantungan Indonesia kepada kepentingan-kepentingan asing serta pengaruh ekonomi Cina. Program ini dilakukan dengan jalan menyediakan lisensi impor, alokasi devisa dan kredit hanya bagi pengusaha-pengusaha pribumi. Sasaran utamanya adalah pembentukan modal yang cukup besar melalui kegiatan transaksi-transaksi impor yang sangat menguntungkan untuk dimulainya usaha mendirikan industri-industri substitusi kecil-kecilan.

Pada tanggal 2 Desember 1953, Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisuryo bersama Perdana Menteri menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan diskriminasi dan perusahaan-perusahaan yang

---

<sup>37</sup> Yahya A. Muhammin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 4-5.

sepenuhnya dimiliki oleh warganegara Indonesia, tanpa memandang asal-usul nasionalnya, akan diperlakukan sebagai perusahaan nasional. Akan tetapi, sampai Iskaq digantikan oleh Ir. Roossono Surjohadikusumo, yang merupakan anggota Partai Indonesia Raya (PIR), pada bulan November 1954 dan bahkan sampai jatuhnya kabinet Ali pada bulan Juli 1955, tidak pernah ada perubahan kebijaksanaan untuk membina pengusaha-pengusaha asli melalui sektor impor.

Pada bulan Agustus 1955, Burhanuddin Harahap dari partai Masjumi menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo. Soemitro Djojohadikusumo diangkat sebagai menteri Keuangan dan Kasimo dari Partai Katolik memimpin Kementerian Perekonomian dan bersama-sama dengan Gubenur Bank Indonesia, Sjahfruddin Prawiranegara, mereka duduk sebagai anggota Dewan Moneter.

Satu langkah baru yang diambil oleh Kabinet Harahap adalah memperbaiki cara-cara menyaring para importir nasional dan memberikan hak-hak istimewa yang sama kepada semua pengusaha warga negara Indonesia tanpa memandang asal etnis mereka. Langkah ini terpuji dari segi ekonomi dan moral, namun dari segi politik mengandung bahaya mengingat adanya rasa takut yang luas terhadap pedagang-pedagang Cina. Pada tanggal 1 September 1955, satu bulan setelah memulai masa kerjanya, pemerintah mengambil langkah-langkah baru yang dimaksudkan untuk memberlakukan penyaringan yang alami terhadap para importir nasional dengan jalan mengharuskan mereka pada saat mengajukan permohonan untuk memperoleh lisensi impor, menyetor rupiah yang sama nilainya dengan harga impor, di samping sejumlah uang

untuk tambahan impor. Pada waktu yang bersamaan, para importir diharuskan melaporkan nilai seluruh barang yang hendak mereka beli diluar negeri pada saat mereka mengajukan permohonan untuk memperoleh lisensi impor. Persyaratan untuk membayar uang muka itu juga telah digunakan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, tetapi tak pernah segiat dan seketat itu.<sup>38</sup>

Kabinet Harahap telah berhasil dan konsisten dalam melakukan tugasnya, kabinet ini dapat melaksanakan pembangunan ekonomi melalui perluasan pembentukan modal dengan jalan memperbaiki Program Benteng, membentuk suatu dewan alat-alat pembayaran luar negeri yang baru dan tetap mengizinkan modal asing, serta memberikan bantuan yang besar kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Mulai awal 1957 keamanan memburuk dan pergolakan politik mendorong inflasi. Pengusiran terhadap hampir semua perusahaan Belanda pada akhir tahun 1957 telah menimbulkan gangguan-gangguan yang besar di bidang penanaman modal produksi dan distribusi.

Hampir dua bulan setelah presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli, pemerintah Djuanda mengeluarkan sebuah peraturan dibidang ekonomi yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah No. 10 (PP 10) pada tanggal 14 Mei 1959. Peraturan ini menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak akan diberi izin usaha lagi setelah tanggal 31 Desember 1959. Peraturan ini terutama ditujukan kepada pedagang kecil Cina

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

yang merupakan bagian terbesar dari orang-orang asing yang melakukan usaha di tingkat desa.<sup>39</sup>

#### **D. Kebijakan Ekonomi bagi Komunitas Cina**

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, belum ada suatu kebijaksanaan resmi menyangkut nasionalisme ekonomi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyebutkan bahwa semua warganegara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintah menjamin hak-hak mereka tanpa membedakan asal-usul rasial. Pada bulan September 1946, Wakil Presiden Hatta meyakinkan Cina lokal bahwa Cina yang warga negara akan mendapat kedudukan dan hak yang sama dengan orang Indonesia asli. Mengenai kesempatan kerja, orang Cina akan mendapat pekerjaan dan kedudukan menurut kemampuan dan kepandaian mereka masing-masing.<sup>40</sup>

Cina lokal banyak yang bekerja dibidang perdagangan, oleh karena itu Pemerintah bermaksud membuat kelas pedagang yang berasal dari golongan pribumi demi tercapainya masyarakat yang sama dalam kedudukan perdagangan golongan pribumi dan Cina. Golongan pribumi dianggap sebagai masyarakat yang tertindas dalam hal ekonomi dengan keberadaan komunitas Cina yang dianggap sebagai penguasa lahan ekonomi.

---

<sup>39</sup> Untuk Gantikan Pedagang-Pedagang Kecil Asing, *Kedaulatan Rakyat*, 23 September 1959, hlm. 3, kolom 4.

<sup>40</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984, hlm. 134

Berbagai kebijakan diberlakukan demi pembatasan komunitas Cina dalam kegiatan perdagangan, antara lain:

### **1. Program "Benteng"**

Program "benteng" importir adalah kebijaksanan yang hanya memberikan lisensi impor kepada golongan pribumi. Program ini mulai diperkenalkan pada awal tahun 1950, setelah berdiri Republik Indonesia Serikat (RIS), yang diprakarsai oleh Menteri Kesejahteraan Ir. Djuanda. Sesuai dengan peraturan ini maka orang Cina yang dianggap sebagai orang asing tidak diperkenankan mempunyai lisensi. Sedangkan seperti telah diketahui bahwa modal kebanyakan dimiliki oleh orang Cina. Pemerintah mau menciptakan kelas menengah pribumi di bidang Ekonomi.

Program Benteng tidak betul-betul bertujuan “kerja sama yang sehat antara sesama warga negara”. Program Benteng dikenal sebagai suatu strategi yang digunakan untuk merebut kembali daerah yang hilang karena diduduki musuh yang kuat. Menurut strategi ini, benteng didirikan secara melingkar di sekitar wilayah yang di kuasai musuh. Makin lama lingkaran akan menjadi makin kecil dan akhirnya pasukan yang ada dalam benteng itu akan dapat membasmu musuh. Pemilihan istilah benteng bukan hal yang kebetulan. Orang Indonesia asli ingin memperoleh kembali kendali perekonomian Indonesia yang pada umumnya berada di tangan orang asing, dengan jalan membuat peraturan di bidang impor, dan sedikit demi sedikit meluas ke bidang perekonomian lainnya sampai akhirnya orang

pribumi dapat memegang sepenuhnya kendali perekonomian Indonesia. Ini sering dianggap merugikan kepentingan orang Cina.<sup>41</sup>

Pemerintah Indonesia menentukan dan memilih importir-importir yang layak diberi bantuan pemerintah. Para pengusaha yang lolos penyaringan berhak atas bantuan pemerintah, pengusaha ini dinamakan importir-importir Benteng. Pemerintah membuat satu daftar khusus mengenai barang-barang yang hanya boleh diimpor oleh para importir itu, yang biasanya dinamakan barang-barang Benteng.

Semula persyaratan yang harus dipenuhi oleh para importir Benteng untuk dapat memperoleh bantuan pemerintah, mereka harus merupakan importir baru, perusahaan harus memiliki modal kerja minimum Rp 100.000,00, ruang kantor cukup luas untuk pegawai yang bekerja *fulltime*, dan tenaga kerja yang sudah berpengalaman dalam perdagangan atau kegiatan usaha lainnya. Persyaratan itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap perusahaan impor yang memperoleh pengakuan, memiliki sumber dana, pegawai, dan pengalaman usaha yang diperlukan untuk melakukan usaha impor bukan hanya merupakan perusahaan di atas kertas saja, yang bisa diperalat oleh pedagang-pedagang asing sebagai importir samaran untuk memperoleh bantuan pemerintah.

Ketentuan lain dari program Benteng yang diumumkan pada tahun 1950 menyangkut pemilikan yang berkaitan dengan soal etnis. Ditetapkan bahwa untuk bisa diakui sebagai perusahaan Benteng, sebuah perusahaan

---

<sup>41</sup> Pusat Pengembangan Etika. (1981). Beberapa Catatan Tentang Cina di Indonesia. *Monitor*, No. 9 Tahun III hlm. 5.

impor harus memiliki modal sekurang-kurangnya 70% yang berasal dari bangsa Indonesia asli. Istilah “asli” secara khusus digunakan untuk menunjuk warganegara pribumi. Orang-orang non-asli atau non-pribumi adalah orang-orang di kalangan penduduk Indonesia yang merupakan keturunan Belanda, Cina, Arab. Akan tetapi dalam kenyataannya, di seluruh Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan, kata non-pribumi, secara luas digunakan oleh orang-orang Indonesia, hampir secara khusus untuk menunjuk orang-orang Cina saja, tak peduli apakah mereka Cina *Totok* (orang Cina yang lahir diluar negeri), atau Cina *Peranakan* ( orang Cina yang lahir di Indonesia).<sup>42</sup>

Persetujuan Keuangan dan Ekonomi yang telah dicapai antara Republik Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 di Den Haag, kata *asli* digunakan untuk mengacu kepada golongan ekonomi lemah. Berarti orang-orang Indonesia keturunan asing hanya diperbolehkan memiliki sebanyak-banyaknya 30 persen dari modal suatu perusahaan. Pernyataan ini di pandang oleh orang-orang non pribumi sebagai diskriminasi dan bertentangan dengan cita-cita nasional dari setiap warganegara keturunan asing untuk menjadi patriot Indonesia sejati.<sup>43</sup>

Program benteng tidak mencapai tujuannya untuk menciptakan kelas wiraswastawan pribumi yang tangguh. Faktor yang mengakibatkan kegagalan tersebut terletak pada kekurangnya pengalaman pribumi

<sup>42</sup> Yahya A. Muhammin, *op.cit.*, hlm. 32-33.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Indonesia, kuatnya oposisi dari orang Cina, dan berlangsungnya inflasi terus-menerus yang memaksa pemerintah mengadakan penilaian kembali atas program tersebut.

Dampak dari pelaksanaan program ini adalah melahirkan pengusaha-pengusaha atau importir-importir pribumi yang tidak bermodal dan tidak punya kantor, dengan membawa sebuah akte keluar masuk kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan lisensi impor bermacam-macam barang. Mengantungi lisensi ini, mereka mendatangi pedagang-pedagang Cina yang bermodal untuk menjual lisensi tersebut. Kerja sama antara pribumi yang berlisensi dan Cina yang bermodal inilah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan sistem Ali-Baba.<sup>44</sup>

Ali sebagai sebutan orang pribumi yang berlisensi dagang, dan Baba sebagai sebutan bagi orang Cina yang memiliki modal. Jadi program Benteng yang diprakarsai oleh Menteri Kesejahteraan Ir. Djuanda melahirkan suatu sistem yang disebut sistem Ali-Baba.

Program Benteng ini dikembangkan menjadi sistem Cukong pada masa kekuasaan rezim Soeharto berkuasa. Seperti halnya sistem Ali-Baba, sistem Cukong juga merupakan kerja sama bisnis antara seorang Cina dan seorang Pribumi, bedanya sistem Cukong hanya memanfaatkan orang pribumi yang sudah berkuasa. Biasanya dalam hubungan ini, Si Pribumi menyediakan surat izin dan fasilitas, sedangkan Si Cina menanamkan

---

<sup>44</sup> Leo Suryadinata, 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 91.

modal dalam bisnis, dan menjalankan itu.<sup>45</sup> Pribumi penguasa memilih orang Cina sebagai mitra bisnisnya karena orang Cina adalah yang paling dapat dipercaya menyimpan rahasia sang penguasa, tidak berani dan tidak punya tuntutan politik. Terlebih lagi golongan Cina dianggap lebih lihai dan lebih berpengalaman dalam menciptakan keuntungan bagi sang penguasa.<sup>46</sup>

## **2. Peraturan Wajib Giling Padi.**

Peraturan tahun 1954 bertujuan untuk mengalihkan pemilikan gilingan beras dari orang Cina kepada orang Indonesia pribumi. Dengan alasan untuk menjamin pengadaan dan stabilitas harga beras, pemerintah bermaksud menguasai perdagangan dan peredaran beras dan untuk itu dikeluarkan peraturan wajib giling padi pemerintah dan melarang penggilingan-penggilingan beras menggiling padi di luar pemerintah. Padahal 98 % penggilingan beras adalah milik orang Cina.<sup>47</sup> Peraturan ini menyatakan bahwa tidak akan diberikan izin baru untuk penggilingan beras, yang ada harus dipindah tangankan kepada warga negara Indonesia,

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>46</sup> Amri Marzali. (1994). Kesenjangan Sosial-Ekonomi antar Golongan Etnik. Kasus Cina-Pribumi di Indonesia. *Prisma*, No.12 Tahun XXIII hlm. 64.

<sup>47</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1960, hlm. 75.

yaitu mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan lain kecuali Indonesia.<sup>48</sup>

### **3. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959.**

Presiden Soekarno tanpa terduga dengan tiba-tiba menandatangani Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 atau yang lebih dikenal dengan PP 10. PP 10 merupakan peraturan yang berisi larangan bagi orang-orang asing untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I dan tingkat II yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960. Sebenarnya PP 10 merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Kabinet Djuanda yang dijabat oleh Rachmad Meljomiseno, seorang tokoh NU yang pernah aktif dalam KENSI. Rupanya peraturan ini dibuat sewaktu Presiden Soekarno berada di luar negeri.<sup>49</sup>

Presiden Soekarno pada akhirnya menandatangani peraturan tersebut. Alasan presiden dalam penadatanganan peraturan tersebut sampai saat ini masih bersifat kontroversi, ada dugaan bahwa presiden mendapat tekanan dari kelompok Islam.<sup>50</sup> Pada umumnya perdagangan eceran yang ada di

<sup>48</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 138

<sup>49</sup> Mulai Tanggal 16 November Dilarang Adanja perdagangan Ketcil asing di ibu kota swatantra I, II, dan Karesidenan. Peraturan Presiden No 10/1959 berlaku surut sampai 10-7-59, *Kedaulatan Rakyat*, 19 November 1959, hlm. 1, kolom 1.

<sup>50</sup> Rantjangan PP tentang Larangan Pedagang Ketjil diterima, *Kedaulatan Rakyat*, 5 November 1959, hlm. 3, kolom 4.

daerah-daerah pedalaman didominasi oleh orang-orang Cina, keadaan ini merugikan keberadaan para pedagang Islam yang baru bermunculan, dimana para pedagang Islam ini berkiblat ke NU dan Masyumi. Maka dengan adanya peraturan ini mereka akan diuntungkan.<sup>51</sup>

PP 10 merupakan penegasan dari pelaksanaan SK Menteri Perdagangan No. 2933/M tanggal 11 Mei 1959. Sesuai dengan Bab II pasal 3 Penpres No. 10/1959 yang berbunyi: Kepada perusahaan-perusahaan termasuk pada pasal 2 diberi ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dengan mengingat kelayakan setempat oleh suatu panitia, yang dibentuk oleh Kepala Daerah Tingkat II (bupati) yang bersangkutan dan yang terdiri dari asisten wedana yang bersangkutan sebagai ketua BODM setempat dan orang-orang yang ditunjuk oleh Djawatan Koperasi dan Desa atau intansi-insansi di daerah yang dikuasakan oleh kedua Djawatan tersebut sebagai anggota.<sup>52</sup>

PP 10 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dilaksanakan di seluruh negeri termasuk di Yogyakarta. Seperti telah diketahui berdasarkan sensus tahun 1930 bahwa sebagian besar masyarakat Cina tinggal di Kota Yogyakarta, dan ditambah lagi dengan pemaksaan perpindahan komunitas dari daerah pedesaan yang dilakukan oleh Jepang,

<sup>51</sup> Benny G, Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa, 2003, hlm. 792.

<sup>52</sup> Jg Pokok dan Prinsi Pil PP No. 10/ 59 harus dilaksanakan, *Kedaulatan Rakyat*, 24 November 1959, hlm. 3, kolom 4.

maka jumlah warga yang terkena PP 10 tersebut tidak begitu besar jumlahnya. Sebagai langkah awal dibentuk Panitia Penerapan Ganti Kerugian. Panitia Ganti Kerugian Yogyakarta mengeluarkan daftar pengusaha asing yang dimaksud dalam PP 10, yaitu: dari daerah Sleman: 1. Kwee Siang Hien, 2. Lie Sing Foeng, 3. The Kiem Boen, 4. Lie Giok Tjoe, 5. Thio Swie Djoen, 6. Go Ie Miang, 7. Tio Ie Moy. Dari daerah Bantul: 1. Liem Tjo Hong, 2. Hoo Kie Ping, 3. Auw Tjoei Ling, 4. Tan King Kiat, 5. Liem A Nang. Dari daerah Gunungkidul: 1. Tan Kok Wie, 2. Wong Tjie Kian, 3. Wong Jun Fat. Dari daerah Kulonprogo: hanya satu yaitu Sia Tjien Twan.<sup>53</sup>

Pengusaha-pengusaha tersebut yang dikenai peraturan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang berniat untuk menutup usahanya, yaitu Kwee Siang Hien, Lie Sing Foeng, Go Ie Miang, dan Sia Tjien Twan. Berniat memindahkan tempat usahanya, yaitu Tan Kok Wie.

Memohon untuk menetap yaitu, The Kiem Boen, Wong Jun Fat, dan Lie Giok Tjoe. Memohon ditunda pelaksanaanya yaitu, Wong Tjie Kian. Dan sebagian tidak menyampaikan pernyataan yaitu, Thio Swie Djoen, Liem Tjo Hong, Hoo Kie Ping, Auw Tjoei Ling, Liem A Nang, Tan King Kiat, dan Tio Ie Moy. Lie Giok Tjoe dan Thio Swie Djoen dari Prambanan adalah pemegang lisensi sebagai perantara, sehingga mereka masih

---

<sup>53</sup> Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, *Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960*, Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, 1960, hlm 62.

diijinkan melanjutkan usaha dagang perantara, dan usaha ecerannya diperintahkan untuk ditutup.<sup>54</sup>

Adanya peraturan yang dipandang tidak adil tersebut, Baperki cabang Yogyakarta tidak tinggal diam saja, Baperki mengajukan protes kepada Menteri Inti Distribusi Dr. Leimena dan Menteri Perdagangan Arifin Harahap, yang isinya minta perhatian kedua menteri tersebut terhadap penutupan warung-warung. Baperki Yogyakarta menolak alasan bahwa para pedagang Cina yang dikenai peraturan merupakan Warga Negara Asing hanya dikarenakan mereka tidak memiliki bukti kewarganegaraan Indonesia. Baperki Yogyakarta juga meminta agar usaha-usaha yang ditutup untuk segera dibuka kembali.<sup>55</sup>

Protes ini menunjuk pada Undang-undang Kewarganegaraan, dalam undang-undang tersebut dianut stelsel pasif, artinya bagi golongan asing yang tinggal di Indonesia termasuk di dalamnya Keturunan Cina, Arab dan India, yang secara aktif menyatakan penolakannya terhadap kewarganegaraan Indonesia berarti memilih kewarganegaraan selain Indonesia, sedangkan yang berdiam diri saja tanpa melakukan penolakan berarti memilih kewarganegaraan Indonesia. Dalam stelsel pasif ini berarti setiap warganegara yang memilih kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki bukti kewarganegaraan Indonesia, kerena mereka hanya cukup

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>55</sup> “Warung WNI Keturunan Tionghoa Dalam Wilayah Bantul dan Gunung Kidul ditutup, *Kedaulatan Rakyat*, 9 Januari 1960, hlm. 5. kolom 4.

berdiam diri saja untuk menjadi warganegara, jadi tidak mungkin apabila mereka mempunyai bukti.

Sebaliknya mereka yang dengan tegas melaksanakan penolakannya malah mempunyai bukti, dan juga yang berupa STKI dari pemerintah Indonesia. STKI tersebut telah dihapuskan dan diganti surat tanda bukti WNI dari Pengadilan Negeri yang membayar biaya sebesar Rp. 2.560,- disertai surat penunjukan dari instansi yang meragukan kewarganegaraannya. Pada peristiwa penutupan warung-warung milik keturunan Cina tersebut pihak Panitia Pelaksana PP 10 tidak mau memberikan tanda bukti, sehingga sukar bagi golongan ini untuk memenuhi syarat seperti ditetapkan dalam UUD No.62/1958 atau PP No.67/1958.<sup>56</sup>

Peraturan ini sangat mengejutkan dan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan orang Cina di Indonesia. Karena pada masa itu Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1958 belum dilaksanakan, sehingga terjadi kesimpangsiuran dalam menentukan yang mana asing dan yang mana WNI. Para penguasa militer di daerah-daerah dengan seenaknya mengusir bukan saja orang-orang Cina asing tetapi juga orang-orang Cina yang

---

<sup>56</sup> Di Jogja Terdapat 24 Warung Perusahaan yang harus dilepaskan oleh pemiliknya. *Kedaulatan Rakyat*, 25 November 1959, hlm. 2, Kolom 4.

berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 1946 telah menjadi warga negara Indonesia.<sup>57</sup>

Biarpun PP No.10 ini hanya bertahan satu tahun, tetapi sempat membuat peranakan Cina di Indonesia, khususnya di Yogyakarta tak mampu memperkuat jaringan ekonominya. Akibat P.P.10 hubungan persahabatan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT menjadi terganggu. Pemerintah RRT mengirim kapal-kapalnya untuk mengangkut orang-orang Cina yang ingin meninggalkan Indonesia untuk berdiam di Tiongkok. Hal ini membuktikan pemerintah RI masuk ke dalam perangkap negara-negara imperialis Barat yang ingin merusak hubungan persahabatan Indonesia dengan Tiongkok.

Hubungan antara golongan Cina dan bangsa Indonesia makin memburuk dengan cepat sebagai akibat berlakunya PP-10. RRC menuduh pemerintah Indonesia melanggar perjanjian tentang kewarganegaraan rangkap yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi kepentingan warga negara Cina. Sebagai jawabannya, pemerintah Indonesia melalui Subandrio menuduh bahwa para pedagang Cina “bersalah karena melakukan tindakan kapitalis dan monolistis, dibarengi dengan berbagai macam manipulasi dan spekulasi”. Selain itu Indonesia juga menuduh RRC mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

---

<sup>57</sup> PP 10 Tetap dilaksanakan Secara Tegas dan Bijaksana, *Kedaulatan Rakyat*, 16 Desember 1959, hlm. 3, kolom 3.

RRC melakukan tekanan menentang pemerintah Indonesia dengan memulangkan orang Cina lokal ke Cina. Lebih dari seratus ribu orang Cina meninggalkan Indonesia pada tahun 1960 sebagai akibat PP-10/1959, mereka mengalami banyak kesengsaraan kerena masalah-masalah yang timbul.<sup>58</sup> Akan tetapi pemulangan itu dihentikan oleh RRC atas alasan ekonomis maupun politis. RRC tidak dapat menyerap membanjirnya Cina yang pulang dari perantauan ke dalam ekonomi negaranya. Di samping itu RRC menyadari bahwa kepergian begitu banyak Cina secara tiba-tiba akan mengakibatkan memburuknya perekonomian Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Pramoedya Ananta Toer, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>59</sup> PP-10 Djalan Terus Pres, Menlu, Dubes RRT Senjum-Senjum sehabis Pembitjaraan di Istana *Kedaulatan Rakyat*, 21 November 1959, hlm. 1, kolom 1.